

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUH Pidana dalam proses penyidikan tindak pidana Pencurian Ringan di Polsek Jajaran Kepolisian Resor Wonosobo, kendala – kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 serta solusi yang dapat ditempuh untuk menghadapi kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada pencarian - pencarian, karena mengkonstruksi hukum sebagai refleksi kehidupan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian dianalisa dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Data hasil penelitian yang telah didapatkan dan diolah, disajikan dalam bentuk narasi deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan perbandingan tentang bagaimana proses penyidikan tindak pidana Pencurian Ringan, sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Perma tersebut baru diterapkan secara penuh pada proses penyidikan tindak pidana di Polsek Jajaran Polres Wonosobo pada tahun 2014. Dalam proses penerapan Perma tersebut, Penyidik Polri menemui beberapa kendala terkait masalah terbatasnya waktu pelaksanaan sidang tipiring, pelaku tindak pidana merupakan residivis, serta dalam perkara yang menjadi perhatian publik. Untuk mengatasi kendala tersebut, para penegak hukum di wilayah Kabupaten Wonosobo mencari jalan keluar dengan melakukan pertemuan dan membuat kesepakatan tentang tata cara pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, dengan berdasarkan Nota Kesepahaman Mahkumjapol yang sudah dibuat sebelumnya oleh pimpinan masing – masing lembaga.

**Kata kunci:** Pencurian Ringan, Peraturan Mahkamah Agung, Penyidikan, Tindak Pidana Ringan, Polres Wonosobo, Keadilan Restoratif.

## ***ABSTRACT***

This research aims to find out the application of Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 on Adjustment of Limit Criminal Act and Number of Penalties in Criminal Code in the process of investigating criminal acts of Easy theft in Sector Police Station of Wonosobo Resort Police, the obstacles faced by investigators in applying Regulation of the Supreme Court No. 2 of 2012 and solutions that can be taken to solve the obstacles faced by investigators in applying Supreme Court Regulation No. 2 of 2012.

The research uses a sociological juridical approach, which construct a law as a reflection in society. The data obtained from the research were analyzed by qualitative descriptive analysis method. The research results that have been obtained and processed, presented in the form of descriptive narrative.

The results of the research show a comparison of how the process of investigating criminal acts of easy theft, before and after the implementation of Supreme Court Regulation No. 2 of 2012. The Supreme Court Regulation is only fully applied to the process of investigation of crime in Sector Police Station of Wonosobo Resort Police in 2014. In the process of implementation Regulation of the Supreme Court, Police Investigators encountered several obstacles related to the problem of the limited time of minor offences court, the perpetrators of criminal acts are recidivists, as well as in cases of public concern. To overcome these obstacles, law enforcers in Wonosobo regency seek solutions by meeting and making agreement on the procedures for implementing Supreme Court Regulation No. 2 of 2012, based on the Mahkumjapol Memorandum of Understanding previously made by the respective leaders of each institutions.

**Keywords:** Easy theft, Supreme Court Regulation, Investigation, Minor Offences, Wonosobo Resort Police, Restorative Justice.